**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 3 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN KEPADA
KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN REJANG LEBONG**

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala PPTSP untuk mempercepat proses pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, serta dalam rangka memberikan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau di bidang perizinan, maka dipandang perlu diberikan pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Rejang Lebong;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4861);
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 20 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 57 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 30 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap/Standart Operating Procedure (SOP) Penyelesaian Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Rejang Lebong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Kantor Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPT adalah Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Rejang Lebong.
5. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Kepala KPT adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Rejang Lebong.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
11. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
12. Pendelegasian atau pelimpahan wewenang penerbitan perizinan adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penerbitan perizinan yang diserahkan termasuk penandatanganan atas nama Bupati kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi KPT dalam pengurusan pelayanan perizinan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan di bidang perizinan kepada masyarakat.

BAB III
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN
Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan kepada Kepala KPT sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenis dan bentuk perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), baik perizinan yang telah ada di KPT maupun perizinan lainnya yang masih dilaksanakan oleh SKPD pengelola perizinan terkait.
- (2) Penyerahan perizinan dari SKPD terkait kepada KPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan yang disertai dengan peralatan, dokumen dan data-data pendukung, serta petugas yang memiliki kompetensi di bidang perizinan yang diserahkan.

Pasal 6

- (1) Pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi penetapan kelengkapan persyaratan, pemberkasan, penerbitan, penandatanganan, penomoran, dan penarikan retribusi perizinan.
- (2) Penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala KPT atas nama Bupati.

Pasal 7

Kepala KPT yang diberikan kewenangan penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), wajib memperhatikan :

- a. Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan dimaksud;
- b. norma, standar, pedoman dan kriteria yang ditetapkan serta kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- c. standar pelayanan minimal;
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 8

Pendelegasian wewenang penerbitan perizinan kepada Kepala KPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat ditunda dan/atau ditarik kembali oleh Bupati, sebagian atau seluruhnya, dalam hal :

- a. Kepala KPT atau Kepala SKPD mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruh kewenangan;
- b. Kepala KPT dinilai tidak dapat atau belum mampu melaksanakan wewenang yang didelegasikan;
- c. Kepala KPT tidak dapat melaksanakan pendelegasian wewenang karena perubahan kebijakan Bupati;
- d. Kepala KPT melakukan pelanggaran dalam penerbitan perizinan dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Perubahan, pengurangan, dan/atau penarikan atas pendelegasian kewenangan atas penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

BAB IV KOORDINASI Pasal 10

- (1) Kepala KPT dalam penerbitan perizinan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, harus berkoordinasi dengan SKPD teknis yang tugas dan tanggungjawabnya terkait dengan perizinan yang diterbitkan oleh Kantor KPT.
- (2) Perizinan yang memerlukan rekomendasi dan/atau survey lapangan dari SKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim di bawah koordinasi Kepala KPT.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENGAWASAN DAN PEMBINAAN Pasal 11

- (1) SKPD yang secara teknis terkait dengan perijinan, berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas perijinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Untuk kelancaran dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim yang terdiri dari SKPD terkait.
- (3) Dalam hal diperlukan, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat dan unsur Pemerintah lainnya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan atas perizinan yang diberikan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PELAPORAN Pasal 12

Kepala KPT wajib menyampaikan laporan perkembangan pelayanan perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada SKPD teknis terkait, secara berkala setiap triwulan (tiga bulan) sekali.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Terhadap perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku perizinan dimaksud dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 2013

BUPATI REJANG LEBONG,

SUHERMAN

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2013 NOMOR